

PENGADILAN NEGERI SLEMAN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2024



Jl.KRT. Pringgodingrat No.1,Tridadi,Sleman

Sleman - DI Yogyakarta 55551

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl.KRT.Pringgodingrat No.1,Tridadi,Sleman

Telp. 0274868401 Fax. 0274868401

Sleman - DI Yogyakarta 55551

e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sleman adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Sleman. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sleman, 24 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., Ak.
NIP. 197908222005022001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
PERNYATAAN TELAH DIREVIU.....	3
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
A.1. Dasar Hukum.....	23
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman.....	24
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	25
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	26
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	26
A.7. Capaian Rincian Output dan Pengungkapan Program Prioritas Nasional	33
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
ASET	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	43
C.4. Aset Lainnya	51
KEWAJIBAN	55

C.5. Kewajiban Jangka Pendek	55
EKUITAS.....	57
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	58
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	58
D.2. Beban Pegawai	58
D.3. Beban Persediaan	59
D.4. Beban Barang dan Jasa	59
D.5. Beban Pemeliharaan	60
D.6. Beban Perjalanan Dinas	60
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	61
D.8. Kegiatan Non Operasional	62
D.9. Pos Luar Biasa	63
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	64
E.1. Ekuitas Awal	64
E.2. Surplus (defisit) LO	64
E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset	64
E.3. 2 Koreksi Nilai Persediaan	64
E.3. 3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	65
E.3. 4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	65
E.3. 5 Koreksi Lain-lain	65
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	65
E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)	66
E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar	66
E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung.....	66
E.5. Ekuitas Akhir.....	67
F. Pengungkapan Penting Lainnya	68
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	68
F.2. Pengungkapan Lain-lain	68
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	71
Daftar Hibah Langsung.....	75

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2024	35
Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023.....	36
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024	36
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni TA 2023	37
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	38
Tabel 6.Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	38
Tabel 7.Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	39
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	40
Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	41
Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	42
Tabel 11 Rincian Piutang Bukan Pajak	42
Tabel 12 Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	43
Tabel 13 Rincian Aset Tetap.....	44
Tabel 14 Rincian Saldo Tanah	45
Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	51
Tabel 16. Rincian Aset lainnya	52
Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023.....	55
Tabel 18. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	56
Tabel 19. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	56
Tabel 20. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	57
Tabel 21. Rincian Uang Muka dari KPPN.....	57
Tabel 22. Rincian PNBPN per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023.....	58
Tabel 23. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	58
Tabel 24 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	59
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023.....	60
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	60
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023	61
Tabel 28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	61
Tabel 29 Rincian Kegiatan Non Operasional	62
Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa	63
Tabel 31 Rincian Koreksi Nilai Persediaan	64
Tabel 32 Rincian Koreksi Lain-lain	65
Tabel 33 Transaksi Antar Entitas.....	66
Tabel 34 Transfer Masuk.....	66
Tabel 35Pengesahan Hibah Langsung.....	67
Tabel 36 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2023.....	72
Tabel 37 Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua.....	77

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Semester I TA. 2024 berupa Neraca per tanggal 30 Juni 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan lain terkait. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pengadilan Negeri Sleman.

Reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitik yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sleman, 24 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,


YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK
NIP. 197908222005022001

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Sleman

Jl.KRT.Pringgodiningrat no.1,beran,Sleman Sleman - DI Yogyakarta 55551
Telp. 0274868401 Fax. 0274868401 e-mail : pnsleman@yahoo.co.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sleman, 21 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



YUYUN FITHRIYAH, S.E., AK
NIP. 197908222005022001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sleman Semester I Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan Belanja, selama periode 1 Januari 2024 s.d. 30 Juni 2024 .

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 23,677,480 atau mencapai 141 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 16,816,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 7,161,968,541 atau mencapai 49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14,536,251,000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 25.924.064.313, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 64.559.070; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 25.771.884.645; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 87.620.598.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 880.226.506 dan Rp. 25.043.837.807. Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 880.226.506 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp. 26.090.633, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 8.737.785.952 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.8.711.695.319). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(defisit) sebesar Rp.185.000 dan surplus(defisit) sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp.8.711.510.319).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp. 26.570.282.065 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.8.711.510.319) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp(0) dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.185.066.061 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp.25.043.837.807.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2024, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. Laporan Realisasi Anggaran

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2024 DAN 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	30 Juni TA 2024			30 Juni TA 2023
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	16,816,000	23,677,480	141	21,880,680
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		16,816,000	23,677,480	141	21,880,680
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	12,870,259,000	6,621,989,351	51	7,026,443,853
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,665,992,000	539,979,190	32	700,830,511
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	375,000,000
	Jumlah Belanja Negara		14,536,251,000	7,161,968,541	49	8,102,274,364

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NERACA
PER 30 Juni 2024 DAN 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	60.000.000	
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	4,077,635
Piutang Bukan Pajak	C.1. 3.	1,587,320	
Persediaan	C.1. 4.	2,971,750	3,414,000
Jumlah Aset Lancar		64,559,070	7,491,635
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	23,199,878,000	23.199.878.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	5,153,113,267	5,106,338,267
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10,028,310,356	10,028,310,356
Aset Tetap Lainnya	C.2. 4.	29,074,002	29.074.002
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 5.	(12,638,490,980)	(11,888,954,939)
Jumlah Aset Tetap		25,771,884,645	26,474,645,686
Aset Lainnya	C.3.		
Aset Tak Berwujud	C.3. 1.	7,400,000	7,400,000
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	133,797,000	221,847,000
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(53,576,402)	(137,806,373)
Jumlah Aset Lainnya		87,620,598	91,440,627
Jumlah Aset		25,924,064,313	26,573,577,948
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	796,510,670	2,285,050
Uang Yang Belum Ditagihkan	C.4. 2.	23,715,836	0

Pendapatan Diterima Dimuka	C.4 3.	0	1,010,833
Uang Muka dari KPPN	C.4 4.	60.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		880,226,506	3,295,883
Jumlah Kewajiban		880,226,506	3,295,883
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	25,043,837,807	26,570,282,065
Jumlah Ekuitas		25,043,837,807	26,570,282,065
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		25,924,064,313	26,573,577,948

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	26,090,633	23,241,240
Jumlah Pendapatan		26,090,633	23,241,240
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	7,395,449,890	7,832,676,377
Beban Persediaan	D. 3	38,737,250	49,847,360
Beban Barang dan Jasa	D. 4	333,113,876	413,749,016
Beban Pemeliharaan	D. 5	207,927,866	282,104,238
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	9,201,000	8,795,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	753,356,070	756,165,261
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		8,737,785,952	9,343,337,252
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(8,711,695,319)	(9,320,096,012)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		185,000	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		185,000	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(8,711,510,319)	(9,320,096,012)
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(8,711,510,319)	(9,320,096,012)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SLEMAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2024 DAN 2023
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Ekuitas Awal	E. 1	26,570,282,065	27,562,514,522
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(8,711,510,319)	(9,320,096,012)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	7,185,066,061	8,115,131,184
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1,526,444,258)	(2,130,350,064)
Ekuitas Akhir		25,043,837,807	26,357,549,694

V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagian

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sleman

Visi Pengadilan Negeri Sleman adalah

Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan public khususnya pada Peradilan Tingkat Pertama.

Misi Pengadilan Negeri Sleman adalah

1. Pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur;
2. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;
3. Peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar;

4. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
5. Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas;
6. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, integritas, dapat dipercaya, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Sleman melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyelesaian dalam menangani administrasi perkara
2. Meningkatkan tertib administrasi dan penegakan hukum
3. Meningkatkan jumlah perkara yang diproses/diselesaikan oleh Majelis Hakim secara cepat, adil, akuntabel dan transparan;
4. Meningkatkan kemampuan serta profesionalisme Sumber Daya Manusia pada lingkungan Pengadilan Negeri Sleman.
5. Meningkatkan dukungan koordinasi, kualitas kemampuan Sumber Daya Manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana sebagai modal bagi penyelesaian tugas di Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Negeri Sleman.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

(4.) Kewajiban Jangka Panjang

(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.7. Capaian Rincian Output dan Pengungkapan Program Prioritas Nasional

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI SLEMAN PER 30 JUNI TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/ Lembaga : Mahkamah Agung (005)
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi (01)
Satuan kerja : Pengadilan Negeri Sleman (098082)
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan (03)
Sub Fungsi : Peradilan (03.04)
Program : Dukungan Manajemen (005.01.WA)
Lokasi : Yogyakarta (040)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005.01 .WA.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	14,536,251,000	7,161,968,541	49,27	1	1	Layanan	49,98	-
	Subtotal	14,536,251,000	7,161,968,541	49,27	1	1	Layanan	49,98	-
	Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	14,536,251,000	7,161,968,541	49,27	1	1	Layanan	49,98	-

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Pengadilan Negeri Sleman DIPA 098082 tidak terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN).

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Sleman telah mengadakan Empat kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. DIPA Pengadilan Negeri Sleman sebesar Rp. 15.536.251.000. Perubahan tersebut berdasarkan sumber Pendapatan dan Jenis Belanja adalah sebagai berikut:

URAIAN	2024	
	Anggaran awal	Anggaran setelah revisi
Pendapatan Negara dan Hibah		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	16,816,000	16,816,000
Penerimaan Hibah	0	0
Jumlah Pendapatan dan Hibah	16,816,000	16,816,000
Belanja		
Belanja Pegawai	13,870,259,000	12,870,259,000
Belanja Barang	1,665,992,000	1,665,992,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	15,536,251,000	14,536,251,000

Revisi tersebut antara lain berupa revisi Revisi Pemutakhiran Halaman 3 DIPA dan Revisi Pergeseran POK. Revisi POK pergeseran antar akun dilakukan untuk memenuhi Operasional kantor. Anggaran belanja pegawai Pengadilan Negeri Sleman juga mengalami revisi oleh eselon I.

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp23.677.480*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp.23,677,480 atau mencapai 141 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.16,816,000.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16,816,000	23,677,480	141
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai	0	0	0

Tahun Anggaran Yang Lalu

4.		0	0	0
	Total Pendapatan	16,816,000	23,677,480	141

Realisasi pendapatan per 30 Juni TA 2024 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan 30 Juni TA 2023 sebesar 8,21%. Hal ini disebabkan peningkatan penerimaan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang berasal dari pemanfaatan BMN berupa sewa ATM di lingkungan Pengadilan Negeri Sleman serta fluktuasi jumlah hakim yang masuk ke Pengadilan Negeri Sleman.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	2023	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	23,677,480	21,880,680	8.21
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
	Total Pendapatan	23,677,480	21,880,680	8.21

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
7.161.968.54
1

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp. 7,161,968,541 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 49% dari anggaran senilai Rp. 14,536,251,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2024		
	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	12,870,259,000	6,621,989,351	51

Belanja Barang	1,665,992,000	539,979,190	32
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	14,536,251,000	7,161,970,490	49
Pengembalian Belanja		(1949)	
Total Belanja Netto	14,536,251,000	7,161,968,541	49

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 940.305.823 atau sebesar 11.61 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Fluktuasi jumlah pegawai dan Hakim yang mutasi keluar dari Pengadilan Negeri Sleman yang berdampak pada menurunnya realisasi belanja pegawai Pengadilan Negeri Sleman.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	6,621,989,351	7,026,444,853	(404,455,502)	(5.76)
Belanja Barang	539,979,190	700,830,511	(160,851,321)	(22.95)
Belanja Modal	0	375,000,000	(375,000,000)	(100.00)
Total Belanja	7,161,968,541	8,102,274,364	(940,305,823)	(11.61)

B.3. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
6.621.989.351*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 6.621.989.351 dan Rp. 7.026.443.853.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai,realisasi Belanja Pegawai TA 2024 mengalami penurunan sebesar 5,76 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Fluktuasi jumlah pegawai dan Hakim yang mutasi masuk keluar dari Pengadilan Negeri Sleman yang berdampak pada menurunnya realisasi belanja pegawai Pengadilan Negeri Sleman. Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	2,552,979,620	2,437,300,100	4.75
Belanja Pembulatan Gaji PNS	34,146	30,198	13.07
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	162,584,380	168,861,350	(3.72)
Belanja Tunj. Anak PNS	49,917,802	51,152,782	(2.41)
Belanja Tunj. Struktural PNS	23,040,000	21,960,000	4.92
Belanja Tunj. Fungsional PNS	2,948,187,000	3,469,635,000	(15.03)
Belanja Tunj. PPh PNS	498,981,072	464,893,633	7.33
Belanja Tunj. Beras PNS	114,713,280	121,955,280	(5.94)
Belanja Uang Makan PNS	248,709,000	275,026,000	(9.57)
Belanja Tunjangan Umum PNS	22,845,000	15,630,000	46.16
Total Belanja Brutto	6,621,991,300	7,026,444,343	(5.76)
Pengembalian Belanja	1,949	490	297.76
Total Belanja Netto	6,621,989,351	7,026,443,853	(5.76)

B.4. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
539.979.190*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 539.979.190 dan Rp. 700.830.511. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami penurunan 23.52 persen dibandingkan realisasi belanja barang tahun 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya belanja operasional pada tahun 2024.

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
	Realisasi	Realisasi	

Belanja Keperluan Perkantoran	249,723,550	278,955,350	(10.48)
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,308,000	1,788,500	(26.87)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	25,350,000	35,785,000	(29.160)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	29,714,250	52,448,310	(43.35)
Belanja Langganan Telepon	1,396,653	1,024,313	36.35
Belanja Langganan Air	366,500	365,000	0.41
Belanja Sewa	29,160,000	58,043,000	(49.76)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	71,292,700	168,923,228	(57.80)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	-
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	122,917,537	94,702,810	29.79
Belanja Perjalanan Biasa	8,750,000	8,795,000	(0.51)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	-
Total Belanja Brutto	539,979,190	700,830,511	(22.95)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	539,979,190	700,830,511	(22.95)

B.5. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal : Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp. 375,000,000.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan TA 2023, disebabkan Pengadilan Negeri Sleman tidak memperoleh pagu belanja modal pada tahun 2024.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	375,000,000	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	375,000,000	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	375,000,000	(100)

B.5. 1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp. 375,000,000, mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dikarenakan pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Sleman tidak mendapat pagu belanja modal. Perbandingan realisasi belanja peralatan dan mesin TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Kendaraan Roda 4	0	375,000,000	(100)
Printer	0	0	
PC	0	0	
Meubelair	0	0	
Total Belanja Brutto	0	375,000,000	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	0	375,000,000	(100)

B.5. 2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belum terdapat realisasi penambahan Nilai gedung dan Bangunan pada semester I 2024.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

ASET

C.1. Aset Lancar

*Aset Lancar: Rp
62.066.560*

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 62,066,560 dan Rp. 4.207.987.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 9 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	60,000,000	0
Belanja dibayar dimuka (Prepaid)	0	4,077,635
Piutang Bukan Pajak	1,587,320	0
Persediaan	2,971,750	3,414,000
Total Aset Lancar	64,559,070	7,491,635

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 60.000.000*

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal Neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 60.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 10 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1	Uang Tunai di Brankas	12,651,100	0
2	Saldo Pajak	(0)	0
3	Uang di Rekening Bank	23,633,094	0
3	Selisih Kas karena Pembukuan	(30)	0
4	Kuitansi yang belum di SP2D kan	23,713,836	0
	Jumlah	60.000.000	0

Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara bulan Juni 2024 yang direkonsiliasi dengan KPPN Yogyakarta tanggal 8 Juli 2024 menunjukkan keadaan Kas pada akhir bulan, uang tunai di Brankas Rp. 12.651.100 dan Rp.0 merupakan Saldo Pajak, uang di rekening Bank Rp. 23.633.094 dengan kuitansi yang belum diSP2D kan Rp. 23.713.836 sehingga selisih Kas karena pembukuan Rp. 30,-

C.1.2. Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan
Pajak: Rp
1.587.320*

Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.587.320 dan Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 11 Rincian Piutang Bukan Pajak
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1	Piutang PNB	1.587.320	0
	Jumlah	1.587.320	0

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran atau serah terima nya pada tanggal Neraca. Piutang Bukan Pajak Pengadilan Negeri Sleman per

30 Juni 2024 merupakan piutang PNBPN dari pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2024.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.2.971.750*

Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.2.971.750 dan Rp. 3.414.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	2,889,250	3.414.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	82,500	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	2.971750	3.414.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
25.771.884.645*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp. 25,771,884,645 dan Rp.26,474,645,686.

Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada Pengadilan negeri Sleman berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan dan Aset tetap Lainnya.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 13 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni 2024	31 Desember 2023	Perubahan
1	Tanah	23,199,878,000	23,199,878,000	-
2	Peralatan dan Mesin	5,153,113,267	5,106,338,267	46,775,000
3	Gedung dan Bangunan	10,028,310,356	10,028,310,356	-
5	Aset Tetap Lainnya	29,074,002	29,074,002	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	-
	Jumlah	38,410,375,625	38,363,600,625	46,775,000
	Akumulasi Penyusutan	(12,638,490,980)	(11,888,954,939)	749,536,041)
	Nilai Buku Aset Tetap	25,771,884,645	26,474,645,686	(702,761,041)

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp23.199.878.00
0

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 23.199.878.000 dan Rp. 23.199.878.000, tetap/tidak mengalami perubahan.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	23.199.878.000
Mutasi Tambah	0
...	...
Mutasi Kurang	0
...	..
Koreksi Revaluasi Nilai Tanah	0
Saldo per 30 Juni 2024	23.199.878.000
Nilai Buku 30 Juni 2024	23.199.878.000

Tabel 14 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah	Nilai Revaluasi
1.	2.01.01.01.004	437	Sertipikat Hak Pakai Nomor 26/Desa Tridadi Tanggal 28-2-1990	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	389.804.00 0	1.294.831.0 00
2.	2.01.01.01.004	510	Sertipikat Hak Pakai Nomor 4/Desa Tlogoadi Tanggal 2-6-1995	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	370.260.00 0	1.329.570.0 00
3.	2.01.01.01.004	270	Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Sidoagung Tanggal 27-5-1987	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	366.930.00 0	655.560.00 0
4.	2.01.01.01.004	267	Sertipikat Hak Pakai Nomor 25/Desa Tridadi Tanggal 28-2-1990	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	242.436.00 0	792.723.00 0
5.	2.01.01.01.004	474	Sertipikat Hak Pakai Nomor 3/Desa Tridadi Tanggal 17-9-1986	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	490.116.00 0	1.383.606.0 00
6.	2.01.01.01.004	1032	Sertipikat Hak Pakai	Pemerintah Republik	Tanah Bangunan	744.072.00	2.350.896.0

			Nomor 35/Desa Tridadi Tanggal 2- 6-1986	Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Rumah Negara Tanpa Golongan	0	00
7.	2.01.01.01.004	450	Sertipikat Hak Pakai Nomor 161/Desa Tridadi Tanggal 18- 1-2010	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	374.850.00 0	1.336.050.0 00
8.	2.01.01.01.004	2730	Sertipikat Hak Pakai Nomor 24/Desa Tridadi Tanggal 28- 2-1990	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.278.730.0 00	8.779.680.0 00
9.	2.01.01.01.004	500	Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Sariharjo Tanggal 27- 5-1987	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukk an	520.000.000	1.461.500.00 0
Jumlah						6.777.198.00 0	19.384.416.0 00

Pada TA 2017 dilakukan Revaluasi atas tanah, dengan nilai Koreksi atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN untk tanah sebesar Rp.1.363.602.000, sehingga nilai aset Tanah setelah Revaluasi menjadi Rp.20.748.018.000.

Pada tahun 2020 dilakukan Revaluasi atas tanah, berdasarkan BAIP-148/REV/WKN.09/KNL.06/2020 tanggal 21 Desember 2020, dengan nilai Koreksi atas Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN untuk tanah sebesar Rp.2.451.860.000, sehingga nilai aset Tanah setelah Revaluasi menjadi Rp.23.199.878.000.

Berdasarkan arahan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. melalui surat Nomor 207/SEK/PL.07/5/2023 Perihal Inventarisasi Dan Koreksi Pencatatan Atas BMN Guna Persiapan RKBMN Tahun 2025 dan mempedomani Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 167/BUA.4/PL.09/06/2024 Perihal Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan Koreksi Data Aset dalam Rangka Persiapan RKBMN Tahun 2025, telah dilakukan inventarisasi dan koreksi terhadap data aplikasi SAKTI modul aset tetap pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Juni 2024 melalui Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sleman Nomor W13.U2/1871/PL.02/VI/2023. Reklasifikasi Aset Tanah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

No	BMN Tercatat Semula	Perbaikan Yang Dilakukan	BMN Tercatat Menjadi
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II / 2.01.01.01.002/ NUP 4 (Luas 267 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklasifikasi keluar Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 2. Reklasifikasi masuk menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I / 2.01.01.01.001/ NUP 1
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II / 2.01.01.01.002/ NUP 8 (Luas 450 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklasifikasi keluar Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 2. Reklasifikasi masuk menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I / 2.01.01.01.001/ NUP 2
3.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II / 2.01.01.01.002/ NUP 6 (Luas 474 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Reklasifikasi keluar Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II 2. Reklasifikasi masuk menjadi Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I 	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I / 2.01.01.01.001/ NUP 3

C.4. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
5.153.113.267*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 5,153,113,267 dan Rp. 5,106,338,267.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	5,106,338,267
Mutasi Tambah :	46,775,000
-Pembelian	
-Transfer masuk	
-Hibah (Masuk)	46,775,000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2024	5,153,113,267
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(4,410,381,460)
Nilai Buku 30 Juni 2024	742,731,807

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin pada Semester I Tahun Anggaran 2024 adalah berupa hibah masuk dengan nilai total sebesar Rp 46.775.000, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hibah (masuk) AC Split sebanyak 2 unit @ Rp.7.300.000
- b. Hibah (masuk) Alat kantor lainnya (*Access Gate*) sebanyak 1 unit @ Rp.32.175.000

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.5. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
10.028.310.356*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 10,028,310,356 dan Rp 10,028,310,356.

Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	10,028,310,356
Mutasi Tambah	
-Pembelian	-
-Transfer masuk	-
-Hibah (Masuk)	-
-Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi Kurang	
- Rumah Negara Kondisi Rusak Berat	-
Saldo per 30 Juni 2024	10,028,310,356
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(8,228,109,520)
Nilai Buku 30 Juni 2024	1,800,200,836

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang dalam rangka perolehan Gedung dan Bangunan pada Semester I Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan arahan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. melalui surat Nomor 207/SEK/PL.07/5/2023 Perihal Inventarisasi Dan Koreksi Pencatatan Atas BMN Guna Persiapan RKBMN Tahun 2025 dan mempedomani Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 167/BUA.4/PL.09/06/2023 Perihal Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan Koreksi Data Aset dalam Rangka Persiapan RKBMN Tahun 2025, telah dilakukan inventarisasi dan koreksi terhadap data aplikasi SAKTI modul aset tetap pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 Juni 2023 melalui Surat Keterangan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Negeri Sleman nomor W13.U2/1872/PL.01/VI/2023. Rincian Reklasifikasi Aset BMN Rumah Negara adalah sebagai berikut:

No	BMN Tercatat Semula	Perbaikan Yang Dilakukan	BMN Tercatat Menjadi
1.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen/ 4.01.02.02.007/ NUP 10 (Luas 70 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: 3. Reklasifikasi keluar Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 4. Reklasifikasi masuk menjadi Rumah Negara Golongan I	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen / 4.01.02.01.007/ NUP 1

		Tipe C Permanen	
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen/ 4.01.02.02.007/ 2.01.01.01.002/ NUP 18 (Luas 70 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: 3. Reklasifikasi keluar Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 4. Reklasifikasi masuk menjadi Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen / 4.01.02.01.007/ NUP 2
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen / 4.01.02.02.007/ NUP 20 (Luas 70 m ²)	Melakukan penyesuaian kodefikasi barang dengan melakukan reklasifikasi BMN sebagai berikut: 3. Reklasifikasi keluar Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen 4. Reklasifikasi masuk menjadi Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen / 4.01.02.01.007/ NUP 3

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya: Rp 29.074.002

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 29.074.002 dan Rp29.074.002

Tidak terdapat Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya sebagaimana berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	29.074.002
Mutasi Tambah	0
-Pembelian	
-Transfer masuk	0
-Hibah (Masuk)	
Mutasi Kurang	0

Saldo per 30 Juni 2024	29.074.002
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	29.074.002

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 12.638.490.980

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp.12,638,490,980) dan (Rp.11,888,954,939).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Tabel 15. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,153,113,267	(4,410,381,460)	742,731,807
2	Gedung dan Bangunan	10,028,310,356	(8,228,109,520)	1,800,200,836
3	Aset Tetap Lainnya	29,074,002	0	29,074,002
	Jumlah	15,210,497,625	(12,638,,490,980)	2,572,006,645

C.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya : Rp 87.620.598

Nilai Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp.87.620.598 dan Rp. 91.440.627.

Aset Lainnya merupakan asset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Sleman terdiri dari aset lain-lain.

Rincian Aset Lainnya per 30 Juni TA 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Aset lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	Perubahan
1	Aset Tak Berwujud	7.400.000	7.400.000	-
2	Aset Lain-lain	133,797,000	221,847,000	(88,050,000)
	Jumlah	133,797,000	221,847,000	-
	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(53,576,402)	(137,806,373)	84,229,971
	Nilai Buku Aset Lainnya	87,860,655	91,680,684	(3,820,029)

Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya sejumlah Rp.53.576.402. Aset Tak Berwujud berupa ATB Lainnya dan tersaji dalam neraca senilai Rp.7.400.000, sedangkan Aset Lain-lain berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan senilai Rp.133.797.000, yang terdiri dari

- a. Mesin Ketik 1 unit senilai 55.000 dan
- b. Meubelair 1 unit senilai Rp.41.000.
- c. Rumah Dinas 1 unit yang rusak berat senilai Rp.133.701.000

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp.7.400.000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.7.400.000 dan Rp.7.400.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Tidak terdapat Mutasi nilai ATB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2023	7.400.000
Mutasi Tambah	
-Pembelian	0
-Transfer masuk	0
-Hibah (Masuk)	0
Mutasi Kurang	0

Saldo per 30 Juni 2024	7.400.000
Akumulasi Amortisasi s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku 30 Juni 2024	7.400.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Sleman berupa website yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Pada tanggal 29 Desember 2023 berdasarkan surat Kuasa Pengguna Barang nomor 3763/SEK.PN.W13-U2/PL.1.2.5/XII/2023 telah dilakukan reklasifikasi kode barang sebagai berikut:

No	Reklasifikasi Keluar			Reklasifikasi Masuk		
	Kode Barang	Nama Barang	NU P	Kode Barang	Nama Barang	NUP
1	8010101001	Software Komputer	1	8010101999	Aset Tak Berwujud Lainnya	1

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 133.797.000*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 133,797,000 dan Rp. 221,847,000. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Negeri Sleman serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2023	221.847.000
Mutasi Tambah:	0
-Rumah Negara Yang Rusak Berat	0
Mutasi Kurang:	
-penghapusan/pemusnahan BMN	(88.050.000)
Saldo per 30 Juni 2024	133.797.000

Aset lain-lain mengalami penurunan jika dibanding tahun 2023, dikarenakan adanya pemusnahan BMN berdasarkan Plt.Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36/SEK/PL1.2/II/2023 tanggal 5 Februari 2024 tentang Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan rincian barang yang dimusnahkan sebagai berikut:

- a. Software Komputer Aplikasi Perkara senilai Rp.83.050.000
- b. Software Komputer ESET File Security Business Edition New 3 Years (Anti virus) senilai Rp.5.000.000.

Total Aset Lain-lain Pengadilan Negeri Sleman senilai Rp. 133.797.000, berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan yang terdiri dari:

- a. Mesin Ketik 1 unit senilai 55.000 dan
- b. Meubelair 1 unit senilai Rp.41.000.
- c. Rumah Dinas 1 unit yang rusak berat senilai Rp.133.701.000

C.4.3. Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi aset
Lainnya: :
Rp 53.576.402*

Saldo Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing (Rp.53,576,402) dan (Rp. 137,806,373).

Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Akumulasi Penyusutan /Amortisasi Aset Lainnya sejumlah Rp.53.576.402 terdiri dari akumulasi penyusutan aset lainnya senilai Rp. 53.576.402 dan Amortisasi Aset Lainnya senilai Rp.0.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Aset Tak berwujud:			
	-Software	7.400.000	0	0
	Jumlah Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-lain:			
	-AsetTetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	133.797.000	53.576.402	87,620,598

-Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0
Jumlah Aset Lain-lain	133,797,000	53.576.402	87,620,598
Jumlah	133,797,000	53.576.402	87,620,598

KEWAJIBAN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp.880.226.506

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 880,226,506 dan Rp. 3,295,883. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2024 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 17. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	796,510,670	2,285,050
Utang Yang Belum Ditagihkan	23,715,836	0
Pendapatan diterima dimuka	0	1,010,833
Uang Muka dari KPPN	60.000.000	0
Jumlah	880,226,506	3,295,883

C.5.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp.796.510.670

Utang kepada pihak ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Utang pihak ketiga pada Pengadilan Negeri Sleman per 30 Juni 2024 terdiri dari belanja

pegawai dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp. 796,510,670 dan Rp. 2,285,050, terjadi kenaikan sebesar 36.741,68 persen. Hal ini dikarenakan penggunaan basis full akrual pada modul SAKTI. Perbandingan rincian saldo Utang Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar	775,565,670	2,105,131	36741.68
Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	20,945,000	179,919	11541.35
Utang Pihak Ketiga Lainnya			
Jumlah	796,510,670	1,779,865	44651.18

C.5.2. Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan Rp.23,715,836

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp. 23,715,836 dan Rp.0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga ataupun kuitansi yang belum di SPP kan. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan Per 30 Juni 2024 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024
Kuitansi UP Bendahara Pengeluaran yang belum di SPJ kan	23,715,836
Jumlah	23,715,836

C.5.3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka Rp.0

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.1.010.833. Pendapatan diterima dimuka ini adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Perbandingan rincian saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
Pendapatan Diterima Dimuka	0	1.010.833	(1.010.833)
Jumlah	0	1.010.833	(1.010.833)

C.5.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN:
Rp 60.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.60.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar. Perbandingan rincian saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Rincian Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan
Uang Persediaan	60.000.000	0	(60.000.000)
Tambahan Uang Persediaan	0	0	0
Jumlah	60.000.000	0	(60.000.000)

EKUITAS

C.14. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
25,043,837,807

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 25,043,837,807 dan Rp. 26,570,282,065. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP :
Rp26.090.633*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 26,090,633 dan Rp. 23,241,240. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 22. Rincian PNBPN per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2024	2023	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	26,090,633	23,241,240	12.26
	Total Pendapatan	26,090,633	23,241,240	12.26

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
7,832,676,377*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 7,832,676,377 dan 7,868,128,396 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 23. Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Gaji Pokok PNS	2,874,962,460	2,726,106,400	5.46
Beban Pembulatan Gaji PNS	35,957	32,640	10.16
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	182,326,180	188,812,120	(3.44)
Beban Tunj. Anak PNS	55,937,656	57,312,524	(2.40)
Beban Tunj. Struktural PNS	25,920,000	24,840,000	4.35
Beban Tunj. Fungsional PNS	3,311,272,000	3,894,735,000	(14.98)
Beban Tunj. PPH PNS	541,185,617	512,294,573	5.64

Beban Tunj. Beras PNS	128,980,020	136,584,120	(5.57)
Beban Uang Makan PNS	248,135,000	274,329,000	(9.55)
Beban Tunjangan Umum PNS	26,695,000	17,630,000	51.42
Total Beban Pegawai	7,395,449,890	7,832,676,377	(5.58)

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp.38.737.250*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 38,737,250 dan Rp.49,847,360. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Persediaan Konsumsi	38,737,250	49,847,360	(22,29)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Total Beban Persediaan	38,737,250	49,847,360	(22,29)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan Jasa :
Rp.333.113.876*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 333,113,876 dan Rp. 413,749,016. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan terjadi penurunan Beban Barang dan Jasa jika dibanding tahun lalu, hal ini disebabkan antara lain terjadinya penghematan atas beban operasional perkantoran serta fluktuasi mutasi Hakim yang berdampak pada beban sewa.

Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	275,069,685	314,356,235	(12.50)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,748,000	2,235,500	(21.81)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	25,350,000	35,785,000	(29.16)
Beban Langganan Telpon	1,398,191	1,344,281	4.01
Beban Langganan Air	388,000	365,000	6.30
Beban Sewa	29,160,000	59,663,000	(51.13)
Total Beban Barang dan Jasa	333,113,876	413,749,016	(19.49)

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp 207.927.866

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.207,927,866 dan Rp.282,104,238. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	72,233,700	168,923,228	(57.24)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133,022,166	107,164,810	24.13
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2,672,000	6,016,200	(55.59)
Total Beban Pemeliharaan	207,927,866	282,104,238	(26.29)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp 9,201,000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 9,201,000 dan Rp. 8,795,000. Beban tersebut adalah merupakan

beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,201,000	8.795.000	
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	
Total Beban Perjalanan Dinas	9,201,000	8.795.000	

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp753.356.070

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 753,356,070 dan Rp. 756,165,261. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	141,242,888	164,912,531	(14.35)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	608,293,153	587,432,701	3.55
Beban Amortisasi Software	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3,820,029	3,820,029	0.00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	753,356,070	756,165,261	(0.37)

D.8. Kegiatan Non Operasional

Defisit Kegiatan
Non
Operasional :
Rp. 185.000

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 29 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2024	TA 2023	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya:	185.000	0	100.00
-Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	185.000	0	100.00
-Pendapatan penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya:	0	0	0
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0	0	0
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	185.000	0	100.00

D.9. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing
*Rp26.570.282.0*⁶⁵ sebesar Rp.26,570,282,065 dan Rp. 27,562,514,522.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus/Defisit LO : Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar
(Rp.8.711.510.319) (Rp.8,711,510,319) dan (Rp. 9,320,096,012). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset : Rp.0 Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan : Rp.0 Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap : Rp.0 . Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi : Rp.0 . Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp.0) dan (Rp.0).

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain : Rp.0 Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 32 Rincian Koreksi Lain-lain per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas : Rp.7.185.066.061 Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 7,185,066,061 dan Rp. 8,115,131,184.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset/Kewajiban dari suatu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Tabel 33 Transaksi Antar Entitas
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Jenis	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8,102,274,364
Diterima dari Entitas Lain	(21,880,680)
Transfer Masuk	34,737,500
Jumlah	8,115,131,184

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/DKEL : Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas (Rp.23.677.480) atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga /7.161.968.541 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp.23,677,480 dan DKEL sebesar Rp. 7,161,968,541.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk : Rp.0 Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0 terdiri dari:

Tabel 34 Transfer Masuk
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Jenis/Keterangan	Entitas Awal	Nilai
1	-	-	-

E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung : Rp.46.775.000 Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp.46.775.000. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 terdiri dari:

Tabel 35 Pengesahan Hibah Langsung
per 30 Juni TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Pengesahan
1	PT. BTN Persero Tbk KC Yogyakarta	Barang	Rp.46.775.000
Total			Rp.46.775.000

Pengesahan Hibah Langsung merupakan Hibah dari PT BTN Persero Tbk KC Yogyakarta untuk menunjang pelayanan publik di Pengadilan Negeri Sleman sesuai Berita Acara Pengesahan MPHLBJS NOMOR: BA-41/KPN.1501/2024 Tanggal 20 Mei 2024 berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

- 2 unit AC Split @Rp.7.300.000 dengan nilai total Rp.14.600.000
- 1 unit alat kantor lainnya (*Access Gate*) senilai Rp.32.175.000

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir
Rp.25.043.837.8
07

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 25,043,837,807 dan Rp. 26,357,549,694.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK yang perlu mendapat penyelesaian lebih lanjut pada LK Semester I Tahun Anggaran 2024.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sleman adalah:

1. Virtual Account BRI KC Sudirman A/C 653240980821000 a.n. BPG 030 PENGADILAN NEGERI SLEMAN QQ 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp23.633.094

F.2.1. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA pada TA 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke 01 tanggal 7 Februari 2024 terkait Revisi POK dan Penyesuaian Halaman III DIPA
2. Revisi DIPA ke 02 tanggal 22 April 2024 terkait Revisi POK dan Penyesuaian Halaman III DIPA
3. Revisi DIPA ke 03 tanggal 6 Mei 2024 terkait Revisi Penyesuaian Halaman III DIPA
4. Revisi DIPA ke 04 tanggal 7 Juni 2024 terkait Revisi Penyesuaian PAGU belanja pegawai oleh eselon 1

F.2.2. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat SPM,SSBP maupun SSPB yang perlu mendapat penyelesaian lebih lanjut di dalam Semester I Tahun Anggaran 2024.

F.2.3. Catatan Penting Lainnya

Berdasarkan surat Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Nomor 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, serta surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 2651/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 29 April 2024 maka terjadi perubahan pejabat perbendaharaan TA 2024 sebagai berikut:

SEMULA :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Nur Yusuf Irawan S.T., SH
Pejabat Pembuat Komitmen	: T. Ririk Budi Lestari, ST, MH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Alamsyah, ST
Bendahara Pengeluaran	: Girindra Rasika Listunimitta, SH
Bendahara Penerimaan	: Dyah Rahajeng Indreswari, SE, MBA

MENJADI :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Yuyun Fithriyah, S.E., Ak
Pejabat Pembuat Komitmen	: Girindra Rasika Listunimitta, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Ahmad Alamsyah, ST
Bendahara Pengeluaran	: Zuni Atmawati, A.Md
Bendahara Penerimaan	: Dyah Rahajeng Indreswari, SE, MBA

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Sleman

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				Saldo Awal	Mutasi Penyusutan	Total	
	INTRAKOMPTABEL						
A.	Tanah	6,670	23,199,878,000	0	0	0	23,199,878,000
	TANAH PERSIL	6,170	21,528,488,000	0	0	0	21,528,488,000
	TANAH NON PERSIL	500	1,671,390,000	0	0	0	1,671,390,000
B.	Peralatan dan Mesin	1,308	5,153,113,267	(4,269,138,572)	(141,242,888)	(4,410,381,460)	742,731,807
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4	805,358,617	(483,930,045)	(26,785,714)	(510,715,759)	294,642,858
	ALAT KANTOR	178	657,255,684	(595,108,060)	(11,601,349)	(606,709,409)	50,546,27
	ALAT RUMAH TANGGA	899	1,482,148,200	(1,337,825,190)	(22,933,518)	(1,360,758,708)	121,389,492
	ALAT STUDIO	30	117,914,820	(77,948,946)	(6,656,782)	(84,605,728)	33,309,092
	ALAT KOMUNIKASI	9	17,735,100	(15,447,050)	(457,610)	(15,904,660)	1,830,440
	PERALATAN PEMANCAR	1	400,475,000	(400,475,000)	0	(400,475,000)	0
	ALAT KEDOKTERAN	1	11,000	(11,000)	0	(11,000)	0
	ALAT KESEHATAN UMUM	1	65,000	(65,000)	0	(65,000)	0

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				Saldo Awal	Mutasi Penyusutan	Total	
	KOMPUTER UNIT	113	1,302,262,256	(1,044,392,691)	(60,861,415)	(1,105,254,106)	197,008,150
	PERALATAN KOMPUTER	71	369,540,590	(313,588,590)	(11,946,500)	(325,535,090)	44,005,500
	PERALATAN OLAH RAGA	1	347,000	(347,000)	0	(347,000)	0
C.	Gedung dan Bangunan	13	10,028,310,356	(7,619,816,367)	(608,293,153)	(8,228,109,520)	1,800,200,836
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	8,445,786,356	(6,907,273,631)	(553,482,168)	(7,460,755,799)	985,030,557
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	11	1,582,524,000	(712,542,736)	(54,810,985)	(767,353,721)	815,170,279
D.	Aset Tetap Lainnya	142	29,074,002	0	0	0	29,074,002
	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	142	29,074,002	0	0	0	29,074,002
E.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	3	133,797,000	(49,756,373)	(3,820,029)	(53,576,402)	80,220,598
	ALAT KANTOR	1	55,000	(55,000)	0	(55,000)	0
	ALAT RUMAH TANGGA	1	41,000	(41,000)	0	(41,000)	0
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1	133,701,000	(49,660,373)	(3,820,029)	(53,480,402)	80,220,598
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		38,544,172,625	(11,938,711,312)	(753,356,070)	(12,692,067,382)	25,852,105,243

Pengadilan Negeri Sleman
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	PT. BTN Persero Tbk KC Yogyakarta	Barang	-	Rp.46.775.000	Rp.46.775.000 Berdasarkan Berita Acara Pengesahan MPHLBJIS NOMOR: BA- 41/KPN.1501/2024 Tanggal 20 Mei 2024	-	-
			Jumlah :		Rp.46.775.000	-	-